

**PERSPEKTIF KEKUASAAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH:

FANY RAHMAWATI

2020/20042011

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di
Universitas Negeri Padang

Nama : Fany Rahmawati

NIM/TM : 20042011/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2024

Disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA

NIP. 198112292006042002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

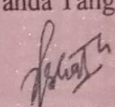
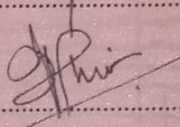

Pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

**“Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas
Negeri Padang”**

Nama : Fany Rahmawati
NIM/TM : 20042011/2020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	1..... 
Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D	2..... 
Anggota : Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM	3..... 



**Mengesahkan
Dekan FIS-UNP**

Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D

NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fany Rahmawati
TM/NIM : 2020/20042011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Fany Rahmawati

20042011

ABSTRAK

Fany Rahmawati (20042011): Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang

Penelitian ini membahas tentang perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, umumnya korban enggan untuk melaporkan dan tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di UNP yang meliputi modus kekerasan seksual, pelaku dan korban kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, respon korban terhadap tindakan kekerasan seksual dan respon lembaga terhadap fenomena dan laporan kekerasan seksual serta upaya meminimalkan intimidasi pelaku terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959) dengan empat dimensi yaitu: 1) relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, 2) unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), 3) adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, 4) masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UNP semenjak adanya Satgas PPKS dipicu oleh pola-pola kekuasaan, walaupun terdapat beberapa temuan atau pengecualian pada kasus kekerasan seksual di UNP. Selain itu, merujuk pada Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf (1959) menunjukkan bahwa terdapat pemenuhan empat dimensi dari tiga dimensi yang ada.

Kata Kunci: Kekuasaan, Kekerasan Seksual, Universitas

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang**". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP, M.PA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas saran dan arahan yang Ibu berikan selama penyusunan skripsi ini, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M. Pd, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan

masukan, saran dan perbaikan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

6. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukan, saran dan perbaikan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang telah membantu memberikan informasi dan data demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Zulfardi dan Ibu Endang Purwanti. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, cinta, doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana. Semoga Papa dan Mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
10. Teristimewa juga kepada ketiga saudara kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Abang, *Uda* dan Kakak sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

11. Untuk sahabat dan teman-teman terbaik penulis. Terima kasih karena sudah mau berjuang bersama-sama dan saling melengkapi satu sama lain serta terima kasih untuk segala bentuk cinta, doa, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020. Berbagai suka dan duka dalam perjuangan meraih gelar ini akan menjadi memori indah yang selalu penulis kenang. Mari berjuang untuk kesuksesan berikutnya.
13. Terakhir untuk diri penulis sendiri, kamu luar bisa dan akan selalu luar biasa. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini serta telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Bahagialah dimanapun kamu berada dan tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Akhirnya penulis berharap, semoga “karya Kecil” ini mampu memberikan inspirasi yang besar bagi semua pihak. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, 14 Agustus 2024

Fany Rahmawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Penelitian Relevan	26
C. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32

C. Lokasi Penelitian	33
D. Informan Penelitian	33
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Temuan Umum	42
B. Temuan Khusus	58
C. Pembahasan	99
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Universitas Negeri Padang	43
Gambar 4.2 Kekerasan Seksual Dapat Terjadi di Lingkungan Kampus	59
Gambar 4.3 Aktivitas yang Rentan Minimbulkan Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	62
Gambar 4.4 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	35
Tabel 4.1 Anggota Satgas PPKS UNP	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan selalu ada dalam masyarakat manapun, baik dalam struktur yang sederhana, besar, atau kompleks. Meskipun kekuasaan selalu ada, namun kekuasaan tidak dapat dimiliki secara merata oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena adanya kekuasaan yang tidak merata tersebut, maka menimbulkan tujuan utama dari adanya kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan (Risvandi & Andri, 2022). Kekuasaan dalam disiplin Ilmu Administrasi Negara masih memiliki kaitan yang cukup erat, karena dengan adanya kekuasaan tersebut maka penerapan dari kebijakan publik dan pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan baik serta tidak dapat dipungkiri bahwa para aktor perumus atau pembuat kebijakan dalam disiplin ilmu administrasi negara ialah pemerintah yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif dan kelompok kepentingan yang masing-masing memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sah (Goodnow, 2016).

Relasi kuasa mempunyai makna yang mengacu pada dinamika kekuasaan antar individu, kelompok atau lembaga dalam suatu sistem sosial dan politik, menunjukkan bahwa praktik relasi kekuasaan dapat menjadi perwujudan dari relasi yang saling menguasai (Widiastuti & Makhasi, 2019). Relasi kuasa dipandang sebagai cara yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam mengendalikan atau mempengaruhi pihak lain yang dimaksudkan untuk mencapai

kekuasaan dengan cara yang berbeda berdasarkan hubungan sosial, struktur dan relasi (Royandi dkk., 2018)

Hubungan antar komponen-komponen negara seperti antara warga negara dan penyelenggara negara seringkali ditemukannya konflik, salah satunya berkaitan dengan relasi kuasa. Relasi kekuasaan yang terjadi di lingkungan sosial dapat membentuk suatu kekuasaan yang kemudian akan mendatangkan kepentingan dalam tingkat kekuasaan tertentu. Relasi kuasa menurut Michel Foucault yaitu adanya suatu dimensi dari sebuah relasi yang mana saat adanya relasi maka akan ada kekuasaan (Kamahi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dapat terjadi dimanapun karena kekuasaan meluas tanpa dapat ditentukan dan dapat terjadi di seluruh aspek sosial. Michel Foucault menyadari bahwa ada banyak kekuasaan dan otoritas dalam hubungan antar manusia yang tersebar luas. Keseluruhan kekuasaan dan wewenang tersebut misalnya terdapat dalam berbagai aspek hubungan antar manusia, seperti hubungan antara seseorang dengan orang lain dan antara seseorang dengan lingkungan atau keadaan tertentu (Syafiuddin, 2018).

Ini sejalan dengan Teori Konflik yang disampaikan oleh Ralf Dahrendorf mengenai konsep perubahan struktural pada masyarakat akibat dari adanya otoritas. Dalam Teori Konflik tersebut terdapat konsep mengenai kekuasaan yaitu kemampuan untuk memaksa seseorang mengalahkan orang lain meskipun ada perlawanan dan otoritas yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan hal-hal tertentu. Hal ini menimbulkan dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang

berpartisipasi dalam struktur kekuasaan melalui dominasi dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui ketundukan (Rahmaniah, 2018).

Beberapa tahun terakhir, ditemukannya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan pendidikan berkaitan dengan kekuasaan dan menimbulkan sebuah konflik. Dampak dari adanya penyimpangan kekuasaan di lingkungan pendidikan ini menjadikan seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan tersebut dapat berlaku sewenang-wenang, seperti banyaknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Sumintak & Idi, 2022).

Relasi kuasa umumnya terjalin antara seseorang yang memiliki kuasa dengan pihak lain yang cenderung tidak memiliki kekuasaan, misalnya di perguruan tinggi antara dosen atau tenaga pendidik dengan mahasiswa. Hal ini dikarenakan seorang dosen atau tenaga pendidik memiliki kekuasaan, kekuatan dan ilmu pengetahuan yang dalam beberapa kasus dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang kepada mahasiswa. Mahasiswa yang notabenenya tidak memiliki kekuasaan untuk menolak dan karena adanya kebutuhan terhadap dosen atau tenaga pendidik tersebut untuk keberlanjutan pendidikan yang sedang dijalaninya (Azanella, 2018).

Kekerasan seksual berarti merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang berasal dari adanya ketimpangan relasi kekuasaan maupun ketidaksetaraan gender, sehingga mengakibatkan kerugian psikis dan fisik yang juga menyebabkan penderitaan serta hilangnya

kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan tinggi secara aman dan optimal (Chanigia & Anggalana, 2023). Kekerasan seksual menjadi salah satu fenomena yang banyak mendapatkan perhatian publik, karena korban kekerasan seksual mencakup semua jenis kelamin dan usia. Tekanan dalam bentuk fisik dan psikologis yang dialami oleh korban dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang terhadap kesehatan mental maupun masa depan korban (Fadli, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dari 26.504 kasus kekerasan yang terjadi dari Januari-Desember 2023, 2175 diantaranya adalah kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi (Simfoni PPA, 2023). Selain itu Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terbanyak pada tahun 2015 hingga 2021 berasal dari perguruan tinggi, yaitu kekerasan seksual sebesar 87,91%, kekerasan psikis dan diskriminasi sebesar 8,8%, serta kekerasan fisik sebesar 8,8% (Andriansyah, 2022).

Mengacu pada survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, 77 % dosen di Indonesia menyatakan kasus kekerasan seksual telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun sekitar 63 % kasus yang ada tidak dilaporkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa pelaporan dapat mencoreng nama baik perguruan tinggi tertentu (Rohima dkk., 2023). Hal ini menunjukkan masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang seringkali dilakukan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang justru menjadikan penanganan kasus menjadi terhambat atau bahkan tidak terungkap.

Pada beberapa kasus kekerasan seksual, korban umumnya rentan terhadap gangguan mental sebagai akibat dari perlakuan intimidatif. Intimidasi merupakan sikap atau perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan tekanan secara fisik ataupun psikologis kepada orang lain atau kelompok secara terus menerus (Nuraryo, 2020). Intimidasi menimbulkan dampak negatif bagi korbannya mulai dari rasa malu, stres, depresi hingga bunuh diri. Namun, pelaku intimidasi seringkali menganggap sepele begitupun orang terdekat korban yang kurang tanggap dalam menyadari hal tersebut (Aviani, 2015). Berdasarkan hal tersebut tindakan intimidasi yang dialami korban kekerasan seksual ditambah dengan adanya relasi kuasa menyebabkan korban menjadi sulit untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Korban cenderung tutup mulut karena memikirkan dampak yang akan dialaminya jika memilih untuk mengungkap kasus tersebut. Hal ini tentunya akan mengakibatkan lemahnya pelaporan dalam kasus kekerasan seksual.

Beranjak dari situasi yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini selanjutnya akan dilaksanakan di Universitas Negeri Padang yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Universitas Negeri Padang menjadi salah satu perguruan tinggi yang juga tidak luput dari kasus kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kekerasan seksual yang terungkap dan dipublikasikan di internet, yakni pada tahun 2020, salah satu dosen berinisial FY berusia 29 tahun ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Diketahui, kejadian tersebut terjadi di salah satu toilet gedung fakultas di Universitas Negeri Padang pada 10 Desember 2019, namun korban baru berani

melaporkannya pada 15 Januari 2020 (Raharjo, 2020). Selain kasus tersebut, pada 26 Juni 2023 diketahui terdapat dua oknum dosen yang terindikasi menjadi kaum atau kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kasus ini muncul setelah adanya pengaduan dari keluarga dan istri pelaku yang diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa *flashdisk* yang tertinggal di komputer (Kampai, 2023).

Universitas Negeri Padang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Pelaksanaan tugas Satgas PPKS UNP diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu dengan melakukan survei yang dilakukan setidaknya enam bulan sekali serta menyampaikan hasil survei tersebut kepada Rektor. Pelaksanaan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Satgas PPKS akan menindaklanjuti jika ada laporan kekerasan seksual, apabila korban atau pelaku merupakan penyandang disabilitas maka akan dilakukan koordinasi bersama bidang yang melayani penyandang

disabilitas. Satgas PPKS juga akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan menyampaikan laporan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor setiap enam bulan sekali.

Survei yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Negeri Padang dilakukan *via daring* yang mana didalam survei tersebut terdapat salah satu pertanyaan yang menyatakan apakah anda pernah menjadi korban atau menjadi saksi terjadinya kekerasan seksual di kampus. Dari survei yang dilakukan ada 1.239 responden, 18 diantaranya menyatakan pernah menjadi korban dan 58 diantaranya menyatakan pernah melihat, mendengar atau menjadi saksi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Namun hal tersebut baru masuk pada tahap identifikasi awal sehingga masih perlu pendalaman lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi dan Sosialisasi Satgas PPKS UNP yaitu Bapak Dr. Muhammad Al Hafizh, S.S, MA mengatakan bahwa:

“Sejauh ini Satgas PPKS telah menerima ada 4 kasus laporan kekerasan seksual yang sudah masuk berkasnya, dari 4 kasus tersebut baru 2 yang sampai pada tahap pemanggilan terlapor atau pelaku. Kasus pertama yaitu antara dosen dengan mahasiswa Universitas Negeri Padang dan kasus kedua yaitu antara tenaga pendidik dengan mahasiswa dari luar Universitas Negeri Padang. Namun, untuk kasus kekerasan seksual ini ada mahasiswa yang kadang melapor kemudian dia menyatakan saya mengalami atau menjadi saksi kekerasan seksual tapi setelah didalami oleh anggota Satgas PPKS akhirnya mahasiswa yang bersangkutan mengatakan nantilah saya mau melapor lebih lanjut kalau sudah selesai kuliah dengan pertimbangan kalau saat ini ada kekhawatiran-kekhawatiran bermasalah dengan nilai atau bermasalah dengan tugas akhir dan sebagainya”

Dilihat dari beberapa kasus yang ada, ketimpangan kekuasaan seringkali menjadi faktor dari adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ketimpangan kekuasaan ini biasanya terjadi antara dosen dengan mahasiswa, tenaga pendidik dengan mahasiswa dan senior dengan junior. Adanya kekuatan atau *power* yang dimiliki oleh seorang dosen, tenaga pendidik ataupun senior menjadikan mahasiswa tidak mempunyai pilihan untuk menolak atau membela diri.

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi umumnya memanfaatkan relasi atau hubungan kekuasaan dosen sebagai pembimbing akademik yang dalam situasi tersebut dosen memiliki kuasa penuh terhadap mahasiswa yang dibimbingnya sehingga banyak korban yang mengalami trauma secara psikis akibat kekerasan seksual yang dialaminya (Aisyah, 2022). Selain hal tersebut faktor lain yang menyebabkan lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu kekerasan seksual. Pemahaman dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap individu. Hal ini diperlukan agar setiap orang bisa bertindak cepat dan tepat ketika menjadi korban kekerasan seksual maupun menjadi saksi dari kasus kekerasan seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumintak dan Abdullah Idi (2022) mengidentifikasi fenomena kekerasan seksual di lingkup pendidikan tidak terlepas dari adanya unsur kekuasaan yang mana umumnya terjadi pada perempuan yang berasal dari adanya kaitan antara ideologi kultural dan pola relasional antar gender sehingga adanya diskursus kekuasaan dan hasrat akan seksualitas di lingkup pendidikan akan berdampak pada kehancuran bagi dunia pendidikan. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh Asy'ari (2022) menjelaskan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi yang berbasis keagamaan hal ini didorong oleh banyaknya penafsiran agama yang memposisikan perempuan berada pada tingkatan lebih rendah dari laki-laki yang menimbulkan ketimpangan relasi dan ketidaksetaraan gender.

Melihat dari beberapa laporan kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang, namun hanya sedikitnya yang sampai pada tahap pemanggilan terlapor atau pelaku. Hal ini, disebabkan banyak korban yang memilih tidak jadi melanjutkan laporannya karena kekhawatiran akan nilai maupun keberlanjutan studinya sehingga hal ini tentu akan berdampak pada terkendalanya penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji fenomena kekerasan seksual yang ada di Universitas Negeri Padang berdasarkan perspektif kekuasaan dengan menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf. Adapun judul penelitian ini adalah **“Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Ditemukan sejumlah fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Padang yang di antara pelakunya adalah dosen yang notabene adalah seorang pendidik;

2. Kekurangpahaman mahasiswa tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang;
3. Terbatasnya partisipasi warga kampus dalam memberantas kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang karena keengganan menjadi saksi;
4. Keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena perasaan takut, malu, trauma, khawatir diintimasi yang akan merugikan keberlangsungan pendidikannya.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ada terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan namun untuk membatasi permasalahan agar menjadi lebih terperinci dan tepat sasaran, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu penulis berfokus pada keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena perasaan takut, malu, trauma, khawatir diintimasi yang akan merugikan keberlangsungan pendidikannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang?
2. Apa upaya yang dilakukan Universitas Negeri Padang untuk meminimalkan intimidasi dari pelaku terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Negeri Padang untuk meminimalkan intimidasi dari pelaku terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu karya penelitian baru yang dapat menunjang dalam pengembangan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
 - b. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri dengan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara teori ke praktik di lapangan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman untuk pengembangan maupun pembuatan dalam penelitian sejenis lainnya.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang.

- b. Sebagai penerapan ilmu teori yang di dapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan di lapangan.
 - c. Sebagai bahan pedoman dan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan tugas akhir dan sebagai arsip bagi kampus.
3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.